

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ali. 2009., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ali Ahmad Chomzah. 2002. *Hukum Agraria (pertanahan Indonesia)*, Jilid 2, Prestasi Publisher. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. Revisi)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Kesembilan, Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djoko Poernomo. 2006. *Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Tesis, PPS Universitas Airlangga. Surabaya.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Florianus S.P Sangsun. 2008. *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*. Visimedia. Jakarta.
- Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. PT Citra Aditya Bakti. ,Bandung

- Hardjono Tjitrosoebono. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Restu Agung. Jakarta.
- Hendri Anto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta. Ekonosia UII.
- Ignatius Ridwan Widyadharma.2000. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi*, Mimbar Semarang.
- I Gede A.B Wiranata. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Arkola Press. Surabaya.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*. PT Alumni. Bandung.
- Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 8.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon,dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik”, Artikel Surat Kabar Surabaya Pos, Surabaya, 31 januari 2001.
- Rachmat Setiawan. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Cet-1, Binacipta. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio.1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Prandja Paramita.

- Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sjahran Basah. 1986. Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah, Dies Natalis XXXIX Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 2007)*. UI Press. Jakarta.
- Sonny sumarsono. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. UMM Press. Malang.
- Urip Santoso. 2006. Pejabat Pembuat Akta Tanah “Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta. Pren adamedia Group. Jakarta.

JURNAL

- Ade Kurniady Noor, 2016, *Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3 No.2 Mei – Agustus.
- Bahder Johan Nasution. 2020. "Penerapan Sanksi Adminitratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris". *Recital Review*. Vol. 2. Magister Kenotariatan Universitas Jambi. Jambi.
- Ismail. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion* Edisi 1, Volume 4.
- Made Anggara Giri. 2013. *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah*

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 8.

Syamsir, Elita Rahmi, and Yetniwati. 2018. Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris. *Recital Review*. Universitas Jambi. Jambi.

Yovita Christian Assikin, 2019, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Universitas Padjadjaran. Bandung.

Yanly Gandawidjaja. 2002. *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Wiratni Ahmadi. 2000. *Pendidikan Magister Kenotariatan*. makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran. Bandung.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1998 sebagaimana yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.